



Pelaku Wisata Merasa Terimpit

KETUA DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) DIY, Hery Setyawan menganggap pemerintah inkonsisten. Selain itu, dia juga menilai bahwa pemberlakuan syarat negatif Covid-19 lewat tes usap PCR adalah hal yang kontraproduktif di tengah penurunan level

PPKM di Pulau Jawa yang mayoritas sudah berada di level 2. "Jelas sekali ini lucu. Level (PPKM) turun tapi kok persyaratan naik. Jelas ini sangat menghambat," katanya saat diwawancara, Minggu (24/10).

Yang dimaksud menghambat itu dijelaskan Hery yakni, dari semula bi-

aya penerbangan dalam paket wisata hanya menambah Rp90 ribu untuk tes usap antigen, kini membengkak menjadi sekitar Rp500 ribu untuk biaya tes usap PCR.

Selain itu, meski kini PPKM sudah membaik, Hery menilai pemerintah

● ke halaman 11

Pelaku Wisata

● Sambungan Hal 1

berada di level 2, tidak semua pekerja dan pengusaha khususnya agen perjalanan mendapat pekerjaan. Pasalnya, konsumen baik itu korporasi swasta maupun pemerintah, perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan sebuah perjalanan wisata.

Dia memaparkan, kondisi terburuk industri pariwisata saat ini yakni, salah satunya dari sektor penerbangan pesawat. Sebagai agen perjalanan, pihaknya mengeta-

hui permintaan penerbangan perjalanan pariwisata.

"Ada itu salah satu maskapai sehari hanya empat penerbangan. Biasanya ketika normal sehari belasan, seminggu bisa 80 penerbangan. Dulu sempat naik, sekarang ini harus berhenti lagi," papar Hery.

Diakuinya penjualan tiket pesawat secara *home seller* melalui biro perjalanan kini mati suri. Pasalnya, banyak masyarakat yang menunda perjalanan karena adanya syarat tambahan berupa tes usap PCR ketika akan naik pesawat. "Belum melayani karena permintaan kecil, ka-

lau permintaan kecil pesawat juga enggak ada," imbuh dia.

Dari ketidaksesuaian itu, Hery berharap pemerintah harus konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. Dia meminta syarat bepergian, khususnya berwisata, agar diringankan saja, sebab dirinya mengklaim ASITA merupakan mesin penggerak industri pariwisata. "Mungkin farmasi enggak mau rugi karena stok masih banyak. Tapi sabar dong, kami juga bukan rugi lagi, tetapi enggak bisa bernapas," ungkap dia.

Kekecewaan terhadap

aturan perjalanan dengan pesawat itu semakin jelas dirasakan Hery, sebab ia merasa saat ini pemerintah lebih memprioritaskan industri farmasi yang menurutnya tidak mampu mendatangkan devisa sebesar sektor pariwisata.

"Penghasil devisa kedua sektor pariwisata, tapi mengapa yang dibela sektor farmasi. Sama-sama kalau PCR masih banyak stoknya oke dihabiskan sampai kapan. Jangan udah dihilangkan sekarang muncul lagi. Kuncinya satu, semua bidang butuh konsistensi," tegas Hery. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005